

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Dinas Kesehatan Kota Palembang, Sumatera Selatan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang tersebar di 16 kecamatan kota setempat. (<https://m.antaranews.com>, 2019). Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang, dr Letizia mengatakan bahwa sesuai dengan kriteria standar, pelayanan yang diberikan puskesmas kepada masyarakat dinilai sudah baik dan efisien. ([palembang.tribunnews.com](http://palembang.tribunnews.com), 2019)

Peningkatan kualitas layanan kesehatan tersebut didukung oleh status dari 41 puskesmas di kota Palembang yang sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta adanya kucuran bantuan dana sebesar Rp 600 juta untuk operasional puskesmas tiap tahunnya sesuai dengan luas serta banyaknya pasien JKN di puskesmas tersebut. Semula, puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang segala bentuk pengeluaran harus menunggu dari daerah. Dalam hal ini tidak memungkinkan puskesmas untuk melakukan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan dalam keadaan mendesak karena jika ingin melakukan pengadaan maka harus sesuai dengan anggaran yang dibuat sebelumnya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor sulitnya meningkatkan kualitas pelayanan puskesmas kepada masyarakat. Keputusan Walikota Palembang Nomor 443 Tahun 2011 tentang Penetapan Puskesmas Se-Kota Palembang Sebagai Unit Kerja yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), menjadi salah satu solusi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), maka puskesmas akan lebih mandiri dan fleksibel dalam penggunaan dana. Dengan status sebagai BLUD, puskesmas dianggap mampu beroperasi secara mandiri untuk menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modalnya. Tujuan diberikannya status BLUD tersebut adalah untuk mengoptimalkan pelayanan instansi pemerintah terhadap masyarakatnya. Dengan

adanya BLUD, puskesmas dapat secara cepat memberikan pelayanan yang memadai kepada pasiennya tanpa terkendala pencairan dana dari kas daerah yang biasanya memakan waktu hingga beberapa bulan.

Status BLUD diharapkan mampu menurunkan ketergantungan instansi terhadap porsi APBD, bukan menghilangkan porsi APBD dalam kegiatan operasional instansi tersebut. Status puskesmas pasca BLUD tidak mengubah menjadi BUMD, melainkan tetap milik pemerintah daerah. Hanya pengelolaannya saja yang berbeda, yaitu menjadi fleksibel dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk laporan keuangan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh BLUD puskesmas. Selain itu, laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang berguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Karena itulah, BLUD puskesmas berusaha untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas juga memiliki keterkaitan dalam aspek ketepatan waktu. Sampai tahun anggaran 2018, Dinas Kesehatan yang membawahi BLUD puskesmas menjadi salah satu dinas yang mengalami keterlambatan dalam hal pengumpulan laporan keuangan.

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Wilayah Sumatera Selatan memberi waktu hingga Maret mendatang untuk menyelesaikan laporan keuangan 2017 Pemerintah Kota Palembang yang hingga kini belum selesai lantaran ada empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum menyerahkan laporannya. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang Harobin Mastofa mengatakan, empat OPD yang belum menyelesaikan laporan keuangan tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Pera KP), Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). (Pit, 2018)

Dengan ditetapkannya PSAP 13, kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan BUD puskesmas sebenarnya telah diminimalisir. Namun, pengaruh penerapan PSAP 13 terhadap laporan keuangan perlu untuk diteliti lebih lanjut mengingat bahwa PSAP ini baru dikeluarkan pada tahun 2015. Selain penerapan PSAP 13, hal yang mungkin mempengaruhi pelaporan keuangan BLUD puskesmas adalah mengenai sistem pengendalian internal.

Menurut Setyaningsih (2016) dijelaskan dalam PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal adalah tindakan yang harus dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap perundang-undangan.

Terkait tentang kualitas laporan keuangan, selain diperlukan adanya sistem pengendalian internal yang baik, tentunya dalam proses penyusunan laporan keuangan diperlukan adanya pemanfaatan teknologi informasi yang baik pula. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017) dan Safiyulloh (2017) yang menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penerapan PSAP 13, sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak dapat berjalan secara efektif apabila sumber daya manusia yang bersangkutan tidak ikut ditingkatkan kualitasnya. Rendahnya kualitas sumber daya manusia akan berdampak pada laporan keuangan yang dibuat dan akan menimbulkan adanya ketidaksesuaian laporan keuangan dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Untuk menunjang upaya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Palembang mengadakan Bimtek sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD bagi BLUD Puskesmas se-kota Palembang. Bimtek ini bertujuan agar didalam instansi Dinas Kesehatan Kota Palembang diharapkan dapat disegerakan dalam hal pengimplementasian transaksi non tunai pada pemerintah daerah dalam hal ini khususnya di dalam instansi Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penerapan PSAP 13, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD Puskesmas”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh penerapan PSAP 13 terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas ?
2. Bagaimanakah pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas ?
3. Bagaimanakah pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas ?
4. Bagaimanakah pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas ?
5. Bagaimanakah pengaruh penerapan PSAP 13, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor-faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) puskesmas yaitu penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) 13, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi staf akuntansi. Peneliti juga membatasi jumlah objek dalam penelitian ini yaitu hanya pada puskesmas dengan status akreditasi Paripurna, Utama dan Madya yang ada di Kota Palembang.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan PSAP 13 terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.
5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan PSAP 13, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan BLUD puskesmas.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kualitas laporan keuangan dan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian di bidang akuntansi sektor publik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti yang akan datang.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terkait laporan keuangan BLUD puskesmas Kota Palembang.

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.